

Kondisi Ketenagakerjaan dan Sektor Unggulan selama Pandemi COVID-19 di Provinsi D.I. Yogyakarta

Sri Rahayu Budiani, Waydewin C.B.Rumboirusi, Hasna Maimuna Imsya

Masuk: 03 10 2022 / Diterima: 27 11 2022 / Dipublikasi: 01 12 2022

Abstract *This study aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on employment conditions and the condition of the leading sector during the COVID-19 pandemic in the Regency/City area in the Province of D.I. Yogyakarta. The method used in this research is descriptive analysis and L.Q. analysis using secondary data from BPS and other literature. The study results showed that COVID-19 impacts labor conditions in the D.I. Yogyakarta Province area, which is indicated by changes in TPAK, TPT, percentages based on sector, and average net wages/salaries during the COVID-19 pandemic. Meanwhile, the results of the analysis using L.Q. in Regencies/Cities in DIY Province show that there is no shift in the leading sectors between before the pandemic and during the pandemic.*

Keywords: *Employment Conditions; Leading Sector; COVID-19*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid 19 terhadap kondisi ketenagakerjaan dan kondisi sektor unggulan selama pandemi COVID-19 pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis LQ yang menggunakan data-data sekunder dari BPS dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan COVID-19 memberikan dampak pada kondisi ketenagakerjaan di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta yang ditunjukkan dengan perubahan pada TPAK, TPT, dan rata-rata upah/gaji bersih selama pandemi COVID-19. Hasil analisis menunjukkan terdapat penurunan rata-rata TPAK pada beberapa wilayah di Provinsi DIY, peningkatan TPT dibandingkan sebelum COVID-19, persentase tenaga kerja yang tinggi pada sektor yang terdampak COVID-19, dan penurunan rata-rata gaji bersih di tahun 2020. Sementara itu, hasil analisis menggunakan LQ di Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY menunjukkan tidak terdapat pergeseran sektor unggulan antara sebelum pandemi dan selama pandemi berlangsung.

Kata kunci: Kondisi Ketenagakerjaan; Sektor Unggulan; COVID-19

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



1. Pendahuluan

Wabah penyakit corona di akhir tahun 2019 (COVID-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia memberikan dampak yang sangat besar. Banyak kegiatan masyarakat tidak dapat dijalankan dengan normal

karena resiko penularan COVID yang sangat tinggi. Kondisi tersebut merubah banyak tatanan kehidupan dalam masyarakat terutama dalam sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pada sektor ekonomi, BPS (2021a) menunjukkan selama triwulan 4 tahun 2019 hingga triwulan 4 tahun 2020 hampir seluruh lapangan usaha mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh lapangan

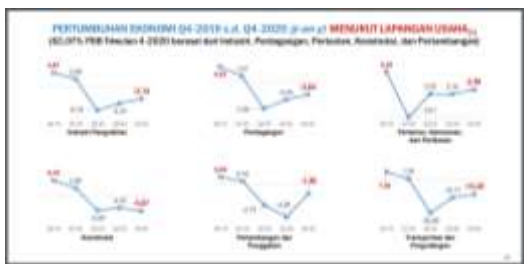
¹Sri Rahayu Budiani, ¹Waydewin C.B.Rumboirusi, ¹Hasna Maimuna Imsya

¹Universitas Gadjah Mada, Indonesia

srahayu@ugm.ac.id

usaha informasi dan komunikasi, dan lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara pertumbuhan stagnan di rasakan oleh lapangan usaha pengadaan air (BPS, 2021) (Gambar 1a, 1b,1c).

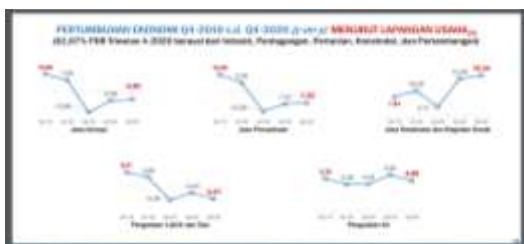
Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik tersebut memperlihatkan gambaran bahwa dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh berbagai lapangan usaha. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi penduduk dan akhirnya akan mempengaruhi pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk.



Gambar 1a- Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha



Gambar 1b: Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha



Gambar 1c: Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Pada sisi yang lain, pandemi juga menyebabkan dampak pada sektor ketenagakerjaan. BPS (2020a) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,23 persen dan seiring dengan masuknya COVID-19 ke Indonesia, TPT mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 7,07 persen. Selain itu, ILO (2020a) menunjukkan COVID-19 menyebabkan penutupan aktivitas ekonomi, penurunan pendapatan hingga pemberhentian pekerja yang menyebabkan banyak pekerja yang harus menganggur akibat COVID-19.

Kondisi tersebut dapat memicu perpindahan tenaga kerja dari suatu sektor ke sektor lain yang lebih menguntungkan. Permata dkk. (2010) menunjukkan pada masa krisis tenaga kerja yang mengalami dampak krisis akan melakukan perpindahan ke sektor yang lebih aman, dan hal ini akan berakibat pada struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan alasan tersebut analisis dampak covid terhadap kondisi ketenagakerjaan menjadi hal yang menarik, karena dampak COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan diduga akan menyebabkan perubahan struktur dan berdampak pula pada perubahan sektor unggulan di suatu wilayah.

Tumenggung (1996) menjelaskan suatu sektor dapat disebut sebagai sektor unggulan jika suatu sektor mampu memberikan nilai manfaat yang besar dan memiliki keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif dari produk sejenis yang berasal dari daerah lain. Sektor unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah karena memiliki

keunggulan-keunggulan dan kriteria untuk dikembangkan. Sektor unggulan yang berkembang lebih lanjut melalui investasi kegiatan ekonomi dapat didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Menurut Ghufron (2008), sektor unggulan menjadi bagian penting dalam perekonomian daerah karena memiliki kriteria sektor unggulan seperti laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja yang relatif besar dan kemampuan menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui sektor unggulan suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDRB). Badan Pusat Statistik (2022b) menjelaskan PDRB sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Besarnya nilai PDRB yang dihasilkan bergantung pada potensi faktor produksi yang terdapat di suatu daerah.

Yulianita (2009) menyatakan identifikasi potensi daerah sangat berkaitan erat dengan rencana pembangunan daerah. Pemetaan potensi daerah diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah tersebut terutama dalam masa krisis. Ketika sektor- sektor yang lain mengalami penurunan aktivitas ekonomi maka mendorong aktivitas pada sektor unggulan dapat dijadikan suatu proses

untuk pemulihan ekonomi di suatu wilayah.

Dalam perwujudan pembangunan global (SDGs), pengembangan potensi unggulan suatu wilayah berkontribusi dalam perwujudan pembangunan global ke-8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan pada tujuan SDGs ke-1. Selain itu, ketika terjadi COVID-19 identifikasi dan pemanfaatan sektor unggulan di suatu wilayah dapat menjadi jaring pengaman sosial melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan aktivitas masyarakat setempat (Masruri dkk, 2021).

Oleh sebab itu, para perencana pembangunan di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota memerlukan analisis wilayah baik dari aspek biofisik maupun sosial ekonomi dengan penentuan komoditas unggulan daerah dan menggunakan pendekatan LQ (*Location Quotient*). Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang menghasilkan semua komoditas yang dapat diproduksi di suatu wilayah. Namun melihat kondisi perekonomian secara global pada masa COVID-19 terdapat indikasi adanya perubahan sektor unggulan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan selama pandemi dan ingin melihat apakah COVID-19 menyebabkan perubahan pada sektor unggulan suatu wilayah selama COVID-19.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder Badan Pusat Statistik hasil Sakernas tahun 2018-2021 semester 2 (Sakernas Agustus) dan sumber lain berupa jurnal, publikasi dan literatur

lainnya. Data tersebut digunakan untuk melihat ketersediaan tenaga kerja secara regional, dan perubahan ketenagakerjaan baik dari jenis pekerjaan maupun pendapatan selama pandemi COVID-19. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis LQ. Analisis deskriptif berupa tabel dan grafik yang menggunakan data sekunder, sedangkan analisis LQ menggunakan data PDRB harga berlaku dalam penghitungannya. Teknik analisis *location quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan sektor unggulan ekonomi berdasarkan share tiap daerah. Analisis LQ dihitung berdasarkan peranan relatif sektor ekonomi wilayah (Mutha'ali, 2014). Pada penelitian ini analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2020 dan 2021. Perbandingan sektor unggulan pada tahun 2020 dan tahun 2021 akan menunjukkan pergeseran sektor unggulan selama COVID-19 pada wilayah Kabupaten/Kota.

3. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Ketenagakerjaan

Mala et. al (2017) menyatakan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan indikator TPAK. Besaran nilai TPAK menunjukkan pasokan tenaga kerja suatu wilayah yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada tabel 1 dapat ditunjukkan rata-rata TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

tahun 2018 sebesar 73,36 persen yang berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat 73 orang yang berpartisipasi aktif untuk bekerja. Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah dengan TPAK tertinggi sebesar 76,66 persen dan Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan TPAK terendah sebesar 68,89 persen. Perbedaan nilai TPAK antar wilayah dapat disebabkan oleh kesadaran penduduk yang memilih untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga memiliki nilai TPAK yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya (Amalia & Sari,2019).

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta, 2018-2021

Kabupaten /Kota	TPAK			
	2018	2019	2020	2021
Kota Yogyakarta	68,89	69,48	68,62	71,86
Sleman	70,94	70,27	70,51	73,05
Bantul	73,66	73,01	74,45	71,64
Gunung Kidul	76,63	76,09	65,30	75,99
Kulon Progo	76,66	76,54	77,88	76,72
Rata-Rata	73,36	73,08	71,35	73,85

Sumber: BPS,2019-2021

Sebelum masuknya COVID-19, Tabel 1 memperlihatkan rata-rata TPAK di tahun 2018 sebesar 73,36 persen. Namun, selama COVID-19 dapat ditunjukkan terdapat penurunan rata-rata TPAK menjadi 71,35 persen di tahun 2020. Beberapa wilayah di Provinsi DIY juga mengalami penurunan TPAK yaitu Kota Yogyakarta sebesar 0,86 persen dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 10,79 persen, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya seperti Sleman, Bantul dan Kulon Progo mengalami peningkatan nilai TPAK. BPS (2022c) menyatakan penurunan dan

peningkatan angka TPAK suatu wilayah pada masa COVID-19 dapat disebabkan oleh dampak yang disebabkan oleh COVID-19 terhadap perekonomian. Pada sisi penurunan, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, namun disisi lain TPAK yang meningkat selama COVID-19 mengindikasikan adanya penduduk yang sebelumnya tidak aktif secara ekonomi didorong memasuki pasar kerja untuk menutupi kurangnya pendapatan dalam rumah tangga.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta, 2018-2021

Kabupaten /Kota	TPT			
	2018	2019	2020	2021
Kota Yogyakarta	6,24	4,95	9,16	9,13
Sleman	4,41	3,98	5,09	5,17
Bantul	2,76	3,07	4,06	4,04
Gunung Kidul	2,11	1,96	2,16	2,20
Kulon Progo	1,51	1,80	3,71	3,69

Sumber: BPS,2019-2021

Dampak COVID-19 juga ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DIY pada tabel 2. Pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja menyebabkan munculnya angka pengangguran (Kairupan, 2013). Tingkat pengangguran terbuka di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY selama COVID-19 di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018-2019. Peningkatan terbesar terdapat pada wilayah Kota Yogyakarta sebesar 9,16 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 5,09 persen dan Kabupaten Bantul sebesar 3,71 persen.

ILO (2021) menjelaskan tingginya angka pengangguran selama

COVID-19 dapat disebabkan oleh gangguan yang ditimbulkan bagi para pekerja baru dan tenaga kerja muda yang akan mengakses ke pasar tenaga kerja. Selain itu, aturan pembatasan aktivitas masyarakat, tingginya pekerja yang dirumahkan dan diberhentikan selama COVID-19 menjadi faktor yang meningkatkan jumlah pengangguran (ILO,2020b). Namun, tingginya tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah juga tidak terlepas dari ketersediaan tenaga kerja pada suatu lapangan usaha tertentu.

Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan persentase jumlah tenaga kerja di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul paling tinggi berada pada lapangan usaha berkategori G (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor). Persentase tenaga kerja di Kota Yogyakarta sebesar 30,29 persen, Kabupaten Sleman sebesar 24,23 persen dan Bantul sebesar 22,22 persen. Tingginya tingkat pengangguran di tiga Kabupaten/Kota tersebut dapat disebabkan oleh persentase jumlah tenaga kerja yang besar pada kategori G. Pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas perekonomian pada sektor ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi serta tingginya tingkat pengangguran.

Kondisi ini berbeda dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo yang memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah. Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan karakteristik pekerja pada Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo memiliki

persentase yang besar pada lapangan usaha dengan kategori A (pertanian, kehutanan, dan perikanan). Pekerja yang bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 42,66 persen dan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 31,39 persen. Pekerjaan di sektor pertanian yang berada pada ruang terbuka dan resiko penyebaran yang lebih kecil menyebabkan aktivitas ekonomi di sektor pertanian masih dapat berlangsung. Kondisi tersebut yang menyebabkan tingkat penganggurannya lebih kecil dibandingkan daerah dengan karakteristik tenaga kerja yang besar pada lapangan usaha berkategori G.

SMERU (2021) dalam penelitiannya juga menjelaskan strategi penghidupan dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 bagi para pekerja di bidang industri, pariwisata dan jasa selama pandemi COVID-19 memiliki pilihan yang terbatas akibat pembatasan mobilitas. Berbeda dengan penghidupan berbasis pertanian yang dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa dan menerapkan strategi penghidupan yang lain seperti swasembada pangan tingkat rumah tangga. Kondisi ini memberikan alternatif bagi sektor pertanian untuk menopang pendapatan rumah tangga yang terdampak Covid 19.

Tabel 3. Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta, 2018-2021

Kabupaten /Kota	Upah/Gaji Bersih			
	2018	2019	2020	2021
Kota Yogyakarta	2.210.543	2.317.449	2.267.519	2.252.574
Sleman	2.128.704	2.632.130	2.595.048	2.370.116
Bantul	2.179.986	2.142.792	2.196.731	2.308.531
Gunung Kidul	1.836.480	1.816.012	1.814.919	1.980.857
Kulon Progo	2.085.957	2.251.571	2.169.284	2.191.503

Sumber: BPS, 2019-2021

Tabel 3 menunjukkan rata-rata upah/Gaji Bersih pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Sebelum COVID-19 pada tahun 2019 rata-rata upah/Gaji Bersih tertinggi berada pada Kabupaten Sleman sebesar 2.632.130 rupiah, dan rata-rata upah/gaji bersih terendah berada pada Kabupaten Gunung Kidul sebesar 1.816.012 rupiah. Selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 dapat ditunjukkan rata-rata gaji bersih di empat wilayah Kabupaten /Kota di Provinsi DIY mengalami penurunan rata-rata upah/gaji bersih yaitu Kabupaten/Kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Namun pada tahun 2021 seiring dengan aktivitas perekonomian yang mulai pulih, rata-rata upah gaji bersih di Provinsi DIY mulai mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata upah/gaji bersih di wilayah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi Sektor Unggulan

Percepatan pembangunan daerah yang paling efektif adalah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan. Pengembangan pada sektor unggulan diharapkan dapat mempercepat pemulihan dampak pandemi. Namun, melihat kondisi

perekonomian secara global dimungkinkan adanya perubahan sektor unggulan. Beberapa sektor mengalami perubahan yang sangat drastis diakibatkan dengan adanya pandemi, dan tidak sesuai dengan prediksi para ahli sebelum pandemi. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah sektor unggulan yang ada di suatu wilayah tetap menjadi sektor unggulan atau berpindah ke sektor yang lain selama pandemi COVID-19.

Bintarto & Hadisumarno (1987) mengungkapkan bahwa terdapat penjelasan subsistem lingkungan fisik di permukaan bumi dan bagaimana manusia tersebar secara alamiah di permukaan bumi akibat adanya faktor fisik lingkungan dengan manusia lain. Setiap wilayah mempunyai kondisi fisik yang berbeda, perbedaan kondisi fisik tersebut dapat menyebabkan perbedaan aktivitas manusia yang ada di dalamnya.

Tabel 4. Nilai LQ Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020-2021

	Kota Yogyakarta		Kabupaten Sleman		Kabupaten Bantul		Kabupaten Gunungkidul		Kabupaten Kulonprogo	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Lapangan Usaha										
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,015	0,015	0,783	0,783	1,382	1,403	2,422	2,436	1,651	1,687
Pertambangan dan Penggalian	0,007	0,006	0,772	0,755	0,966	0,949	2,302	2,360	2,947	3,006
Industri Pengolahan	1,021	1,017	1,049	1,057	1,160	1,170	0,713	0,714	0,874	0,898
Pengadaan Listrik dan Gas	1,563	1,582	0,817	0,816	0,989	1,014	0,644	0,648	0,589	0,593
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,443	1,440	0,476	0,474	0,784	0,780	1,602	1,610	1,201	1,180
Konstruksi	0,701	0,687	1,140	1,141	0,883	0,886	0,935	0,931	1,747	1,641
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,873	0,880	0,929	0,928	1,005	1,005	1,087	1,096	1,514	1,524
Transportasi dan Pergudangan	0,801	0,837	0,998	0,920	0,975	0,996	0,999	1,041	1,696	1,789
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,235	1,204	1,000	0,999	1,214	1,217	0,633	0,658	0,382	0,398
Informasi dan Komunikasi	1,287	1,252	1,005	1,007	0,899	0,900	0,877	0,882	0,531	0,561
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,726	1,705	0,851	0,854	0,713	0,721	0,571	0,581	0,700	0,710
Real Estate	1,318	1,333	1,136	1,140	0,935	0,937	0,515	0,517	0,451	0,458
Jasa Perusahaan	1,037	1,046	1,703	1,699	0,474	0,470	0,426	0,428	0,301	0,305
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,230	1,259	0,827	0,826	0,915	0,923	1,112	1,101	0,965	0,960
Jasa Pendidikan	1,132	1,119	1,199	1,204	0,833	0,822	0,745	0,750	0,613	0,616
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,518	1,531	0,964	0,962	0,719	0,718	0,788	0,791	0,511	0,515
Jasa lainnya	1,014	0,992	0,890	0,892	0,820	0,758	1,310	1,281	1,254	1,214

Sumber : Analisis Data Primer, 2022

Yunus (2010) mengungkapkan bahwa kompleks wilayah merupakan pendekatan yang merupakan gabungan dari pendekatan ekologi dan keruangan. Objek wilayah disoroti secara multivariat. Pendekatan kompleks wilayah dalam penelitian ini mengarah pada konsep keunggulan komparatif wilayah yang melibatkan potensi daerah. Tabel 4 menunjukkan keunggulan masing-masing daerah yang berbeda-beda. Kota Yogyakarta sebagai pusat ibukota Provinsi mempunyai keunggulan di sektor keuangan dan jasa asuransi baik pada tahun 2020, maupun tahun 2021. Sementara itu, Kabupaten Sleman yang kondisinya hampir sama dengan kota Yogyakarta mempunyai LQ tertinggi pada kegiatan jasa Perusahaan dan tidak mengalami perpindahan sektor selama COVID-19. Untuk Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masih didominasi oleh aktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan pada masa COVID-19 dan sebelum COVID-19. Sementara itu, pada Kabupaten Kulon Progo nilai LQ tertinggi berada pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada masa sebelum COVID-19 dan selama pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat ditunjukkan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tidak mengalami pergeseran sektor unggulan antara sebelum pandemi dan selama pandemi berlangsung di tahun 2020. Namun, terdapat perbedaan sektor unggulan antar wilayah di Provinsi DIY yang disebabkan oleh karena karakteristik wilayah yang berbeda. Jika diusahakan secara maksimal sektor-sektor unggulan yang

ada pada masing-masing daerah ini akan dapat mempercepat tujuan pembangunan ekonomi daerah (Wardhana dkk, 2017).

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa COVID-19 memberi dampak pada kondisi ketenagakerjaan di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan pada beberapa TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta selama COVID-19 serta TPT yang mengalami peningkatan di beberapa wilayah selama pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan pertumbuhan tenaga kerja yang tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas pembatasan masyarakat selama COVID-19. Selain itu, kondisi ketenagakerjaan berdasarkan rata-rata upah/gaji bersih menunjukkan COVID-19 di empat wilayah Kabupaten /Kota di Provinsi DIY mengalami penurunan rata-rata upah/gaji bersih yaitu Kabupaten/Kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Namun pada tahun 2021 seiring dengan aktivitas perekonomian yang mulai pulih, rata-rata upah gaji bersih di Provinsi DIY mulai mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, pada analisis sektor unggulan selama pandemi hasil analisis menggunakan LQ di Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY menunjukkan tidak terdapat pergeseran sektor unggulan antara sebelum pandemi dan selama pandemi berlangsung di tahun 2020. Namun, terdapat perbedaan sektor unggulan

antar wilayah di Provinsi DIY yang disebabkan oleh karena karakteristik wilayah yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama kebijakan yang mengutamakan sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah perlu menjadi perhatian penting guna memulihkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang terdampak akibat COVID-19. Kedua, COVID-19 menunjukkan sektor pertanian dapat menjadi pilihan dalam mengatasi krisis ketenagakerjaan selama COVID-19. Oleh sebab itu, pengembangan dan inovasi pada sektor pertanian di Provinsi D.I Yogyakarta selama COVID-19 diperlukan agar pekerja yang tidak memperoleh pekerjaan di sektor non pertanian dapat berpindah ke sektor pertanian. Pada penelitian selanjutnya, penambahan variabel lain seperti PDRB, pengeluaran pengeluaran rumah tangga, cakupan wilayah yang lebih luas dan metode analisis yang berbeda dapat dilakukan sehingga analisis yang dihasilkan dapat lebih komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada fakultas Geografi UGM yang telah memberikan support untuk penelitian sektor unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Amalia, E., & Sari, L. K. (2019). Analisis spasial untuk mengidentifikasi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2017. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 3(3), 202-215.

<https://doi.org/10.29244/ijisa.v3i3.240>

- Bintarto, R & Hadisuwarno, S. (1987). *Metode analisis Geografi*. Jakarta: LP3S.
- BPS. (2019). *Keadaan Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2019*. Badan Pusat Statistik
- BPS. (2020a). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2020*. BPS RI
- BPS. (2020b). *Keadaan Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2020*. Badan Pusat Statistik
- BPS. (2021a). *Berita Resmi Statistik 5 Februari 2021*. Badan Pusat Statistik
- BPS. (2021b). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik
- BPS. (2022a). *Keadaan Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2021*. Badan Pusat Statistik
- BPS. (2022b). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik
- BPS. (2022c). *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat Februari 2022*. Badan Pusat Statistik Jawa Barat
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia
- Ghufron, M. *Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. Bogor. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008.
- ILO. (2020a). Pemantauan ILO: COVID-19 dan dunia kerja. Edisi ke-tujuh Estimasi dan Analisis Terbaru. <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo->

- jakarta/documents/publication/wcms_770140.pdf
- ILO. (2020b). Pemantauan ILO: COVID-19 dan dunia kerja. Edisi kelima Estimasi dan Analisis Terbaru. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_751496.pdf
- ILO. (2021). *An Update on The Youth Labour Market Impact of The COVID-19 Crisis*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/briefingnote/wcms_795479.pdf
- Kairupan, S. P. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi Dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Mala, V. S. N., Suyadi, B., & Sedyati, R. N. (2017). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 11(1), 130-139. <https://doi.org/10.19184/jpe.v11i1.5014>
- Masruri, F. A., & Ruhyana, N. F. (2021). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 31-44.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi.
- Permata, M. I., Yanfitri, Y., & Prasmuko, A. (2010). Fenomena labor shifting dalam pasar tenaga kerja indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 12(3), 269-309. <https://doi.org/10.21098/bemp.v12i3.243>
- SMERU. (2021). Badai yang Sama, Bahtera yang Berbeda:Koping Masyarakat Rentan pada Masa Pandemi COVID-19. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/ib02_koping.pdf
- Tumenggung, S. (1996). *Gagasan dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kawasan Timur Indonesia)*. Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta Karya Departement PU. Jakarta
- Wardhana, D., Ihle, R., & Heijman, W. (2017). Agro-clusters and rural poverty: A spatial perspective for West Java. *Bulletin of Indonesian economic studies*, 53(2), 161-186. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1298722>
- Yulianita, A. (2009). Analisis sektor unggulan dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 70-85.
- Yunus, H.S. (2010). *“Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.